**PELAKSANAAN PERJANJIAN PAKET PEKERJAAN KONSULTANSI ANTARA
SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PERENCANAAN DAN
PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI JAMBI DENGAN
PT. ARTERI CIPTA RENCANA JO PT. RAISSA GEMILANG**

Oleh : Fitri Aulia Simatupang

Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn

Pembimbing II: Dasrol, SH., MH

**Alamat : Jl. Thamrin, Gg. Muawwanah No. 23, Kelurahan Sukamaju,
Kecamatan Sail, Pekanbaru**

Email : fitriaulia41@gmail.com. Telepon : 081374598949

ABSTRACT

Article 1320 of the Civil Code regarding the terms of the agreement, in which the cooperation agreement occurs between the parties. The agreement between the two parties about the importance of the rights and interests of each party involved in the agreement. The agreement applies as binding on the parties that replace it with the requirements in Article 1338 of the Civil Code. The problems examined in this study, namely the implementation of the agreement of supervision of the Jambi Province between the Directorate General of Highways and PT. Arteri Cipta Rencana with what was caused by one party to default on the other party. This writing uses sociological research methods that support the provision of opinions, explain and question about those who support.

This type of research is classified as observational research conducted by survey, namely research directly to the research location using data collection tools in the form of interviews, whereas when viewed from its nature, this writing is descriptive analysis, which means the research is intended to provide an overview detailed, clear and systematic about the main problems of research. Soerjono Soekanto and Sri Mamudji suggested that descriptive research is a study that intends to provide as detailed data as possible about humans, circumstances or other symptoms, with a view to reinforcing hypotheses, to reinforce a theory or formulate new theories.

Based on the results of the study it can be concluded that the rights and obligations in the Consultation Work Package Agreement between the Specific Non Vertical Work Unit Planning and Supervision of the Jambi Provincial National Road and PT. Arteri Cipta Rencana Jo PT. Raissa Gemilang said that the rights and obligations of the parties are equally binding, in other words they carry out the rights and obligations contained in a contract. Sanctions given to both parties in this case PT. Arteri Cipta Rencana Jo PT. Raissa Gemilang and the Implementing Contractor due to not implementing the Agreement stated that the sanctions provided were in the form of written warning, so that PT. Arteri Cipta Rencana Jo PT. Raissa Gemilang can be wise in supervising the implementing contractor, while sanctions for the executing contractor that the disbursement of funds of 5% is held by the Particular Non Vertical Work Unit for Planning and Supervision of the Jambi Provincial National Road, before completing its work properly and correctly and can be accounted for.

Keywords: Cooperation Agreement, Road Supervision

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian kerjasama dalam praktek dewasa ini banyak dilakukan oleh pelaku usaha atau pelaku bisnis di Indonesia, tidak terkecuali yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga dengan PT. Arteri Cipta Rencana yang bertujuan mengembangkan usahanya dan tentu dengan tujuan utama adalah memperoleh keuntungan dari perjanjian tersebut. Dengan adanya kerja sama diharapkan dapat mendukung kegiatan Badan Usaha tersebut untuk memudahkan dalam melakukan aktifitas kerja sama dengan pihak-pihak lain, karena dengan adanya perjanjian kerja sama dapat memberikan jalan keluar apabila para pihak menghadapi berbagai permasalahan sehingga dapat diselesaikan dengan maksimal.

Perjanjian yang dibuat antara Direktorat Jenderal Bina Marga dengan PT. Arteri Cipta Rencana, sebagai salah satu upaya bisnis yang menimbulkan hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian yang dibuatnya. Perjanjian kerjasama tersebut tertuang dalam kontrak kerja yang kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian ini dalam hal melaksanakan jasa pengawasan jalan tahun anggaran 2016.

Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum, antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Karena dengan perjanjian yang dibuat para pihak tersebut merupakan sumber perikatan.¹

Perjanjian juga bisa dikatakan sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban, yaitu akibat-akibat

hukum yang merupakan konsekuensi dari perjanjian yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Bina Marga dengan PT. Arteri Cipta Rencana harus memperhatikan syarat dan azas sebagaimana yang diatur Buku III KUHPerdara.

Perjanjian kerjasama yang dibuat antara Direktorat Jenderal Bina Marga dengan PT. Arteri Cipta Rencana telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Untuk syarat subjektif dalam perjanjian yaitu: masing-masing pihak dalam perjanjian kerjasama itu sepakat dan cakap baik itu pihak Direktorat Jenderal Bina Marga maupun pihak PT. Arteri Cipta Rencana dan untuk syarat objektif dalam perjanjian tersebut jelas yaitu penyelenggaraan pengawasan jalan Tahun Anggaran 2016 sedangkan suatu sebab yang halal yaitu isi dan perjanjian masalah pengawasan jalan tersebut yang menyebabkan pengawasan jalan menjadi terhambat dikarenakan pihak kontraktor tidak mematuhi pelaksanaan pekerjaan sehingga mengakibatkan pekerjaan menjadi tertunda dan lewat waktu. Akibatnya pihak Konsultan meminta waktu kepada Direktorat Jenderal Bina Marga agar menyelesaikan pekerjaan pengawasan dan bukan dikategorikan sebagai pihak yang wanprestasi.

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari pihak PT. Arteri Cipta Rencana bahwa pelaksanaan pembangunan fisik jalan yang dilakukan oleh Kontraktor sudah menyalahi aturan, sehingga mengakibatkan pengaspalan jalan tidak menjadi baik dan sempurna. Tindakan pengaspalan dilakukan oleh Kontraktor pada saat hujan gerimis, dan tentunya akan membuat pekerjaan pengaspalan tersebut tidak sempurna, sehingga harus dilakukan pembongkaran bahu jalan. Hal tersebut tidak sesuai dengan KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan pihak Direktorat Jenderal Bina Marga mendesak pihak konsultan agar menyuruh Kontraktor membongkarnya dan menggantinya dengan aspal yang baru.

---

¹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUHPerdara)*, Rajawali Pers. Jakarta, 2011, hal. 63.

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis sangat perlu dicermati lebih lanjut mengenai perjanjian antara kedua belah pihak, yang sama-sama melakukan perjanjian yang telah disepakati, sah dan mengikat diantara kedua belah pihak baik hak dan kewajibannya sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*). Untuk itu penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul

“Pelaksanaan Perjanjian Paket Pekerjaan Konsultansi Antara Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi Dengan PT. Arteri Cipta Rencana Jo PT. Raissa Gemilang”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja hak dan kewajiban dalam Perjanjian Paket Pekerjaan Konsultansi Antara Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi Dengan PT. Arteri Cipta Rencana Jo PT. Raissa Gemilang ?
2. Apa sanksi yang diberikan kepada kedua belah pihak dalam hal ini PT. Arteri Cipta Rencana Jo PT. Raissa Gemilang dan Kontraktor Pelaksana akibat tidak melaksanakan Perjanjian tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui hak dan kewajiban dalam Perjanjian Paket Pekerjaan Konsultansi Antara Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi Dengan PT. Arteri Cipta Rencana Jo PT. Raissa Gemilang.
- b) Untuk mengetahui Sanksi yang diberikan kepada kedua belah pihak dalam hal ini PT. Arteri Cipta Rencana Jo PT. Raissa Gemilang dan

Kontraktor Pelaksana akibat tidak melaksanakan Perjanjian tersebut.

2) Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 2) Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum khususnya terhadap hukum perdata. Terutama untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama pengawasan teknis jalan antara Direktorat Jenderal Bina Marga dengan PT. Arteri Cipta Rencana.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi kegiatan pengawasan jalan, diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dalam menjalankan kerjasama dalam proses perjanjian kerjasama pengawasan teknis jalan antara Direktorat Jenderal Bina Marga dengan PT. Arteri Cipta Rencana.
- 2) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan agar masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama Pengawasan Teknis Jalan Antara Direktorat Jenderal Bina Marga Dengan PT. Arteri Cipta Rencana.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Berbicara tentang perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang lain atau lebih.² Peran hukum perjanjian itu juga dalam pengaturan ini adalah untuk menafsirkan kemudahan bagi masyarakat yang ingin membuat perjanjian melalui lisan dan tulisan. Oleh karena itu, perjanjian itu dengan mudah akan mengikat mereka yang membuatnya seperti Undang-Undang.³

Wiryono Prodjodikoro memberikan pengertian tersendiri mengenai perjanjian yaitu suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain melaksanakan perjanjian itu.⁴ Sementara K.R.M.T Tirtodiningrat sebagaimana dikutip oleh A.Qirom Syamsudin Meliala mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan Undang-Undang.⁵

Salim HS, mengemukakan bahwa perjanjian merupakan hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta benda kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasi

sesuai dengan yang telah disepakatinya.⁶

Suatu perjanjian dalam artian luas berarti, bahwa setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak. Menurut Yahya Harahap suatu perjanjian diartikan sebagai hubungan hukum kekayaan atau hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁷

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁸

Kepastian dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas

---

² R. Subekti dan Tjitrosudio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita. 2001. hal. 33.

³ David E. Pierce. "Easement Scope, Intensity, and Change". Artikel Pada Jurnal WestLaw Energy & Mineral Law Foundation, Washburn University School of Law, Topeka, Kansas. 2012.

⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung, 1986, hal. 9.

⁵ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 8.

---

⁶ Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHP* Perdata Buku Satu, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal. 27.

⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 25.

⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 59.

dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburannorma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.⁹

Pengertian kepastian hukum tersebut sejalan dengan pendapat dari E. Fernando M. Manulang mengemukakan pengertian kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara.¹⁰

3. Teori Tanggung Jawab

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹¹ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹²

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi

dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

E. Kerangka Konseptual

1. Perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih tertulis maupun lisan, masing-masing sepakata untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.¹³
2. Perjanjian kerjasama adalah perjanjian kerjasama dapat kita lihat yaitu Suatu perbuatan denganmana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁴
3. Pengawasan Jalan adalah proses pengawasan yang dilakukan oleh Konsultan pengawas terhadap pihak pelaksanaan pembangunan yaitu kontraktor fisik jalan dan tindakan pengawasan tersebut harus ditanggungjawabpi oleh pihak konsultan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam

---

⁹H.R. Otje Salman S dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 21.

¹⁰E. Fernando M. Manulang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal. 18.

¹¹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 26.

¹²Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal 48.

---

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007,hal. 355

¹⁴*Ibid*, hal. 356.

penelitian *observasional research* yang dilakukan dengan cara survey¹⁵, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara, sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analisis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Bina Marga dan PT. Arteri Cipta Rencana. Adapun alasan pemilihan judul karena di 2 (dua) lokasi ini penulis dapatkan informasi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3. Populasi dan Sampel

1. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
2. Supervisi Engineer dari PT Arteri Cipta Rencana
3. General Superintenden (Kordinator lapangan dari Pihak Kontraktor)

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara dan yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber dari buku-buku hukum perdata, hukum bisnis dan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang dan Jasa, internet, Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Bina Marga dengan PT. Arteri Cipta Rencana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/percakapan (tanya jawab) secara langsung kepada responden.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Paket Pekerjaan Konsultansi Antara Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi Dengan PT. Arteri Cipta Rencana Jo PT. Raissa Gemilang

Perjanjian Paket Pekerjaan Konsultansi Antara Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi Dengan PT. Arteri Cipta Rencana Jo PT. Raissa Gemilang yang dibuat oleh para pihak untuk disepakati sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kesebelas, Jakarta, Kencana, 2011, hal. 94.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.57.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982, hlm. 32.

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi dengan PT. Arteri Cipta Rencana Jo PT. Raissa Gemilang. Adapun Perjanjian kerjasama tersebut tertuang dalam nomor kontrak KU.08.08/SNVT-P2JN/18. Kedua bela pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian ini dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Adapun pola kerjasama antara Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi dengan PT. Arteri Cipta Rencana Jo PT. Raissa Gemilang diantaranya :

1. Membantu dalam supervisi/pengawasan mutu
2. Membantu dalam review design
3. Memeriksa sungguh-sungguh bahwa pengukuran volume pekerjaan dilaksanakan dengan benar teliti dan sempurna
4. Menjamin bahwa semua laporan yang diserahkan tepat pada waktunya dan dibuat secara aturan yang benar teliti dan memuat semua catatan kemajuan pekerjaan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proyek
5. Bekerjasama dengan staf proyek Bina Marga dalam hal-hal yang menyangkut masalah-masalah teknis.

Jangka waktu perjanjian dan pengakhiran kerjasama ini dilakukan selama 10 (sepuluh) bulan, terhitung mulai tanggal 06 bulan Januari tahun 2016 sampai dengan 11 November 2016. Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2016.

Melihat adanya kerjasama antara Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi dengan PT. Arteri Cipta Rencana Jo PT. Raissa Gemilang,

maka akan penulis sesuaikan dengan mekanisme sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara. Syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdarayang berbunyi untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang terlarang

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tentang apakah tujuan pelaksanaan perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Antara Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi Dengan PT. Arteri Cipta Rencana Jo PT. Raissa Gemilang, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa tujuan dari pelaksanaan perjanjian adalah melakukan pekerjaan pengawasan teknis Preservasi Jalan Batas Kerinci-Batas Sumbar dan Dalam Kota Sungai Penuh.¹⁸

Dalam bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung kesepakatan /persetujuan para pihak yang membuatnya baik secara lisan maupun dalam bentuk tertulis.¹⁹ Dari peristiwa itulah maka timbul suatu hubungan antara para pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Perjanjian merupakan terjemahan dari *Oveereenkomst* sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari

¹⁸ Hasil wawancara penulis dengan PPK SKNVT Bapak Ir. Juara M, Siahaan, pada tanggal 25 Juli 2019.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 97.

toestemming yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/ katasepakat).²⁰

Perjanjian dibuat dengan adanya itikad baik, tanpa adanya unsur paksaan, untuk itu penulis akan menanyakan kepada pihak PT. Arteri Cipta Rencana tentang apakah perjanjian ini dibuat dengan dasar sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun sesuai dengan risalah pemenang lelang yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi.²¹

Dalam pelaksanaan perjanjian dibutuhkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak supaya perjanjian tersebut tidak berat sebelah, maka dari itu dalam penyusunan draft perjanjian dibutuhkan peran kedua belah pihak dalam pembuatannya agar hal tersebut menjadi asas keseimbangan diantara masing-masing pihak. Untuk itu penulis juga menanyakan kepada pihak PT. Arteri Cipta Rencana tentang apakah PT. Arteri Cipta Rencana ikut serta dalam pembuatan perjanjian ini, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa perjanjian Pekerjaan Konsultasi antara Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi dengan PT. Arteri Cipta Rencana Jo PT. Raissa Gemilang tidak dibuat oleh kedua belah pihak, melainkan salah satu pihak saja yaitu pihak Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi, hal tersebut dilakukan sesuai

dengan perjanjian dalam bentuk baku.²²

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan PPK tentang bagaimanakah sejauh ini pelaksanaan perjanjian Pekerjaan Konsultasi antara Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi dengan PT. Arteri Cipta Rencana Jo PT. Raissa Gemilang yang dibuat oleh para pihak untuk disepakati, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan perjanjian pada awal mulanya berjalan dengan baik, namun tetap saja ada kendala dalam pelaksanaannya karena pihak PT. Arteri Cipta Rencana Jo PT. Raissa Gemilang tidak memenuhi prestasinya, sebagaimana yang diperjanjikan.²³

Hal senada juga dikatakan oleh PT. Arteri Cipta Rencana bahwa sejauh ini pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi dengan PT. Arteri Cipta Rencana Jo PT. Raissa Gemilang sudah selesai namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya.²⁴

Namun, menurut Pasal 1319 KUHPerdata, perjanjian kerjasama termasuk dalam perjanjian innominaat. Berdasarkan pendapat-pendapat para sarjana tersebut dapat diartikan bahwa perjanjian adalah sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di

---

²⁰ *Ibid*, hal. 98,

²¹ Hasil wawancara penulis dengan Direktur PT. Arteri Cipta Rencana Bapak Ir. Riandi Situmeang, pada tanggal 26 Juli 2019.

---

²² Hasil wawancara penulis dengan Direktur PT. Arteri Cipta Rencana Bapak Ir. Riandi Situmeang, pada tanggal 26 Juli 2019.

²³ Hasil wawancara penulis dengan wawancara penulis dengan PPK SKNVT Bapak Ir. Juara M, Siahaan, pada tanggal 25 Juli 2019.

²⁴ Hasil wawancara penulis dengan Direktur PT. Arteri Cipta Rencana Bapak Ir. Riandi Situmeang, pada tanggal 26 Juli 2019.

dalam lapangan kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.²⁵

Kegiatan pengawasan jalan yang dilakukan oleh PT. Arteri Cipta Rencana tersebut merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap kontraktor pelaksana dan pihak perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya kepada pihak Bina Marga.

Selanjutnya untuk memenuhi hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, maka penulis menguraikan tentang hak dan kewajiban dari antara kedua belah pihak.

1. Kewajiban dan Hak dari Pihak Pertama :

- a. Kewajiban, yaitu mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia, memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan penyedia.
- b. Hak, yaitu meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa.

2. Kewajiban dan Hak Pihak Kedua :

- a. Kewajiban, yaitu melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan

yang dilakukan oleh PPK, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak dan mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan sistem manajemen keselamatan serta kesehatan kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja.

- b. Hak, yaitu menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak dan menerima fasilitas-fasilitas berupa sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pihak PT. Arteri Cipta Rencana tentang apakah hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian ini sudah berjalan dengan baik, dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa hak dan kewajiban kedua belah sudah tercantum dalam kontrak, namun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala²⁶.

J. Satrio mendefinisikan perjanjian sebagai berikut: Dalam arti yang lebih luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau yang dianggap dikehendaki) oleh para pihak, sedang dalam arti sempit perjanjian disini hanya ditujukan pada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja seperti yang termaksud dalam Buku III KUHPerdara.²⁷ Berdasarkan pada Pasal 1313 KUHPerdara : “ Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan

---

²⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 2 .

---

²⁶ Hasil wawancara penulis dengan Direktur PT. Arteri Cipta Rencana Bapak Ir. Riandi Situmeang, pada tanggal 26 Juli 2019.

²⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1992, hal. 23.

dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.²⁸ Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak. Berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.²⁹

Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan dirinya. Pernyataan kedua belah pihak bertemu dan sepakat penting untuk menunjukkan telah lahirnya suatu perjanjian.³⁰

B. Sanksi yang diberikan kepada kedua belah pihak dalam hal ini PT. Arteri Cipta Rencana Jo PT. Raissa Gemilang dan Kontraktor Pelaksana akibat tidak melaksanakan Perjanjian tersebut

Berdasarkan hasil wawancara penulis tentang apakah akibat hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi dengan PT. Arteri Cipta Rencana Jo PT. Raissa Gemilang, dari hasil wawancara penulis diketahui bahwa akibat hukum dari perjanjian ini adalah timbulnya hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian jasa operasional pemanduan kapal ini.³¹

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Perencanaan dan

Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi dengan PT. Arteri Cipta Rencana Jo PT. Raissa Gemilang ini semula berjalan dengan baik, namun ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya, diantaranya :

1. Pengawasan yang dilakukan tidak maksimal
2. Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan tersebut terlambat dalam melakukan pekerjaan, sehingga waktu pekerjaan menjadi bertambah
3. Material yang digunakan tidak sesuai dengan KAK
4. Melakukan pekerjaan pada waktu hujan datang, sehingga tidak maksimal

Melihat hubungan yang terjadi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pihak kedua telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian ini, sehingga perjanjian ini harus dievaluasi kembali. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan PPK mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi dengan PT. Arteri Cipta Rencana Jo PT. Raissa Gemilang, dalam wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa pihaknya telah melakukan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerjasama tersebut, namun sebaliknya PT. Arteri Cipta Rencana yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian.³²

Penulis juga menanyakan kepada pihak PT. Arteri Cipta Rencana Menurut Bapak, Apakah sebelumnya PT. Arteri Cipta Rencana telah mengetahui bahwa dari awal Kontraktor pelaksanalalai dalam

²⁸ Pasal 1313 KUHPerdota.

²⁹ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta : Liberty, 2004, hal. 28.

³⁰ R. Subekti, *Op.Cit*, hal. 138.

³¹ Hasil wawancara penulis dengan PPK SKNVT Bapak Ir. Juara M, Siahaan, pada tanggal 25 Juli 2019.

³² Hasil wawancara penulis dengan PPK SKNVT Bapak Ir. Juara M, Siahaan, pada tanggal 25 Juli 2019.

melakukan pekerjaannya, dari hasil wawancara penulis diperoleh keterangan dari awal memang perusahaan kami tidak mengetahuinya, tetapi walaupun demikian tetap harus ada kontribusi dari pihak PT. Arteri Cipta Rencana dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi demi menunjang terlaksananya kerjasama ini.³³

Menurut Bapak, Apakah telah terjadi wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi dengan PT. Arteri Cipta Rencana Jo PT. Raissa Gemilang ini, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT. Arteri Cipta rencana, namun pihak PT. Arteri Cipta Rencana membantah bahwa pihaknya sama sekali tidak melakukan wanprestasi.³⁴

Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya maka akan menimbulkan konsekuensi sebagai akibat dari wanprestasi tersebut, hukum memberikan sanksi kepada yang mengingkar janji karena tanpa ada sanksi maka dalam penyelesaiannya akan mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak.

Bentuk-bentuk wanprestasi ini tidak berbeda dengan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerduta, yang menyebutkan : "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu

perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberhutang telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu melampaui batas yang telah ditentukan³⁵."

Dengan demikian jika si berhutang lalai dalam melaksanakan kewajiban, maka kreditur berhak menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos kerugian dan bunga. Dalam kontrak pengadaan barang bahwa kelalaian bagi pihak rekanan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga diberikan sanksi finansial berupa denda karena wanprestasi dalam kontrak, besar denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu perseribu) atau 0,1 % dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan, sedangkan denda bagi pihak yang memberikan borongan atau pengguna barang/jasa atas keterlambatan pembayaran sebesar bunga terhadap nilai tagih terlambat dibayar berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu, tata cara pembayaran denda diatur dalam kontrak.

Dari ketentuan diatas dapat dijelaskan satu persatu akibat wanprestasi yang akan dipikul oleh pihak-pihak yang melakukan wanprestasi yaitu :

a. Pembayaran Ganti Rugi

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerduta dalam hal perikatan perjanjian yang dibuat dengan maksud untuk tidak berbuat sesuatu, tetapi salah satu pihak berbuat, maka pihak tersebut dinyatakan melakukan pelanggaran maka ia diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak

³³ Hasil wawancara penulis dengan Direktur PT. Arteri Cipta Rencana Bapak Ir. Riandi Situmeang, pada tanggal 26 Juli 2019.

³⁴ Hasil wawancara penulis dengan PPK SKNVT Bapak Ir. Juara M, Siahaan, pada tanggal 25 Juli 2019.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal.2.

memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi dengan PT. Arteri Cipta Rencana Jo PT. Raissa Gemilang.

b. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian akan menyebabkan keadaan kedua belah pihak kepada keadaan sebelum perjanjian dilakukan. Jika salah satu pihak telah menerima sesuatu dari pihak yang lain maka barang akan dikembalikan. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim atas permintaan tergugat dapat memberikan jangka waktu yang tidak boleh dari 1 (satu) bulan.

c. Peralihan Risiko

Peralihan risiko diatur Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa : “Jika si berpiutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungan siberhutang”. Dengan demikian jelas apabila debitur tidak menyerahkan barang, maka segala sesuatu yang terjadi atas objek yang diperjanjikan yang menyangkut risiko berada dalam tanggung jawab debitur tersebut.

d. Pembayaran Biaya Perkara

Kewajiban membayar biaya perkara diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara yang menyebutkan, pihak terhadap siapa perikatannya tidak dipenuhi, apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga. Menurut ketentuan tersebut

pihak kreditur dapat menuntut debitur yang lalai untuk pemenuhan perjanjian, atau pembatalan disertai ganti rugi. Misalnya penggantian kerugian karena pemenuhan prestasi terlambat. Bila ia menuntut ganti rugi saja, maka dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan atau pembatalan.³⁶

Menyangkut dengan akibat hukum dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, disamping telah diatur secara umum dalam KUHPerdara, berdasarkan asas kebebasan berkontrak juga diatur dengan ketentuan secara khusus. Lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi dengan PT. Arteri Cipta Rencana Jo PT. Raissa Gemilang yang diadakan secara khusus diatur dalam perjanjian kerjasama yang disepakati bahwa apabila terjadi cedera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerjasama tersebut, pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh penggantian biaya dan/atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau pemberian ganti rugi.

Perjanjian antara Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi dengan PT. Arteri Cipta Rencana Jo PT. Raissa Gemilang, alasan berakhirnya perjanjian adalah karena wanprestasinya salah satu pihak. Pertanyaan yang patut diajukan, apakah istilah ”Pembatalan dan Pemutusan” merupakan dua istilah

---

³⁶ Andasasmita, Komar. *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Bandung, Alumni, 1993, hal 67.

yang mempunyai makna dan akibat hukum yang sama atau sebaliknya berbeda dalam dan akibat hukumnya. Untuk itu, analisis berikut ini memperjelas pemahaman serta penggunaan kedua istilah tersebut.

Dalam hukum perikatan yang dimaksud dengan pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan perikatan itu dianggap tidak pernah ada. Dengan pembatalan perjanjian maka eksistensi perikatan dengan sendiri hapus. Akibat hukum kebatalan yang menghapus eksistensi perikatan selalu dianggap berlaku surut sejak dibuatnya perjanjian.

Pemahaman mengenai pembatalan perjanjian seharusnya dihubungkan dengan tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian, tidak dipenuhinya unsur subjektif, apabila perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak atau karena ketidakcakapan sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan tidak dipenuhinya unsur objektif, apabila terdapat perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyek tertentu atau tidak mempunyai causa atau causanya tidak diperbolehkan sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban dalam Perjanjian Paket Pekerjaan Konsultansi antara Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi dengan PT. Arteri Cipta Rencana Jo PT. Raissa Gemilang bahwa hak dan kewajiban bagi para pihak sama-sama mengikat, dengan kata lain sama-sama menjalankan hak dan

kewajibannya yang tertuang dalam suatu kontrak perjanjian.

2. Sanksi yang diberikan kepada kedua belah pihak dalam hal ini PT. Arteri Cipta Rencana Jo PT. Raissa Gemilang dan Kontraktor Pelaksana akibat tidak melaksanakan Perjanjian tersebut bahwa sanksi yang diberikan adalah berupa teguran secara tertulis, agar pihak PT. Arteri Cipta Rencana Jo PT. Raissa Gemilang dapat bijaksana dalam melakukan pengawasan terhadap kontraktor pelaksana, sedangkan sanksi bagi kontraktor pelaksana bahwa uang pencairan dana sebesar 5% ditahan oleh pihak Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi, sebelum menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya kekuatan hukum yang dapat mengikat perjanjian tersebut sehingga para pihak dalam melakukan perjanjian kerjasama dapat terjamin pelaksanaannya.
2. Perlu adanya pengaturan terhadap kontrak yang jelas, apalagi mengenai wanprestasi, karena wanprestasi sebelumnya tidak diatur dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Ahmadi Miru, 2013. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers. Jakarta
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2011. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*

- KUHPerdata*), Rajawali Pers, Jakarta.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Agus Yudha Hernoko, 2011. *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*, Pradana Media Group, Jakarta.
- A. Qirom Syamsuddin Meliala, 1985. *Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Budiono, 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- , 2001. *Panduan Merancang Kontrak*. PT. Grasindo. Jakarta.
- CST Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta,
- Dasrol, *Hukum Ekonomi*, Alaf Riau, Riau, 2017
- Dominikus Rato, 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- E. Fernando M. Manulang, 2016. *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- H.R. Otje Salman S dan Anton F. Susanto. 2005. *Teori Hukum (Meningat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2004 *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1983. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2007. *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman dan kawan-kawan, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mashudi dan Mohammad Chidir Ali, 1995. *Bab-Bab Hukum Perikatan (Pengertian-Pengertian Elementer)*, Mandar Maju, Bandung.
- Munir Fuady. 2000. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Hukum Bisnis Modern Di Eropa Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1992. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Mandar Maju. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Purwahid Patrik, 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung.
- R. Subekti dan Tjitrosudio. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Pramita, Jakarta.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. PT. Bale. Bandung.
- Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung
- Salim HS, 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerdata*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2006. *Hukum Kontrak, Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Soerjono Soekanto, 2000. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2006. *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*, Liberty, Edisi Kedua (Cetakan Kedua), Yogyakarta
- Sudargo Gautama, 2004. *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

B. Jurnal

- Allan L. Gopper, Order (A) Authorizing Sale Free And Clear of All Liens, Claims Encumbrances and Interest: And (B) Granting Related Relief” Westlaw, Chapter II, case No.10 13779 (ALG) di akses melalui Jurnal West Law, tanggal 27 September 2019 Pukul 17.00Wib
- Enra Alexsander Marpaung, *Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Supir Dan Pengusaha Jasa Angkutan Pada CV. Alexsander Travel*. Vol.5 No. 2 Tahun 2018
- Lovelly Dwina Dahen, *Analisis Yuridis Terhadap Hak-hak atas Tanah yang berada diatas Hak Pengelolaan Pelabuhan*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNRI, Vol.2 No. 2 Tahun 2012
- Manufactures, FinanceCo”equality” Jurnal West Law, Supreme Court of The United States 1935, diakses melalui Jurnal West Law, tanggal 27 September 2019 Pukul 16.00 Wib
- Novina Sri Indiraharti. “Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan)” .Artikel Pada Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 4 No. 1 Tahun 2014.

- R.M. Panggabean. “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”. Artikel Pada Jurnal Hukum No. 4 Vol. 17 Oktober 2010: 651 – 667.
- David E. Pierce. “Easement Scope, Intensity, and Change”. Artikel Pada Jurnal WestLaw Energy & Mineral Law Foundation, Washburn University School of Law, Topeka, Kansas. 2012
- Revenue Agent David Garrett. “Non Docketed Service Advice Review” Artikel Pada Jurnal WestLaw. District Counsel, Georgia District, Atlanta. June 30, 1999.
- Westlaw, 2017, “Chapter 1 Contract Theory, Remedial Choices, and Relationships” Jurnal Modern Law of Contract , 1:3 Contract as Moral Duty.

C. Kamus

- Setiawan Widagdo, 2010. *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta